

**IMPLIKASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM
DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**MUHAMMAD FAJAR RISKI RENALDO
NPM : 71180111003**

ILMU HUKUM/HTN/HAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD FAJAR RISKI

NPM : 71180111003

PROGRAM STUDI : HUKUM

BAGIAN/PROG.KEKHUSUSAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA/HAN

Menyetujui

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II Anggota Pengaji

Dr. Marzuki,SH.M.Hum H. Jauhari Ginting, SH.MH Dr. Ibnu Affan,SH.M.Hum

Ketua Prodi S 1 Hukum Ketua Bagian Hukum Tata Negara/HAN

Maria Rosalina, SH.M.Hum H. Jauhari Ginting, SH.MH

Dekan

Dr. Marzuki,SH.M.Hum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang dengan susah payah membesar, mendidik dan membiayai pendidikan penulis.
2. Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan.

4. Ibu Nurasiah Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan
5. Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan.
6. Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU.
7. Bapak Jauhari Ginting, SH.MH, sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara/Tata Negara sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini dan juga tenaga kepegawaian yang telah membantu dalam administrasi perkuliahan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik semuanya.

Medan, April 2022
Penulis

Muhammad Fajar Riski Renaldo

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat	11
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat	11
2. Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat ...	13
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	17
1. Periode Sebelum Kemerdekaan Indonesia	17
2. Periode 1945-1949 (berlakunya UUD 1945 Pertama)	18
3. Periode 1949-1950 (Masa Berlakunya Konstitusi RIS 1949)	19

4. Periode 1959-1966 (setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 kedua pada Orde Lama)	20
5. Periode 1966-1998 (berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ketiga, Orde Baru)	22
6. Periode 1999-2004 (Awal Reformasi)	23
C. Rekonstruksi Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat	24
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Objek Penelitian.....	31
B. Sifat dan Jenis Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data.....	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Perbedaan/Perubahan Kedudukan Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	34
B. Kedudukan Tugas dan Wewenang MPR Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	46
C. Implikasi Atas Kedudukan Tugas dan Wewenang MPR Sebelum dan Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	58

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. M. Fatwa, **Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945**, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Anwar, **Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara**, Intans Publishing, Malang, 2011.
- Bagir Manan, **DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru**, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Budiman B. Sagala, **Tugas Dan Wewenang MPR**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Dahlan Thain, **Teori dan Hukum Konstitusi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Eddy Purnama, **Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara lain**, Nusamedia, Bandung, 2017.
- H. M. Thalhah, **Dinamika Ketatanegaraan Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2011,
- I Dewa Gede Atmadja, **Hukum Konstitusi**, Setara Press, Malang, 2015.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, **Dasar-Dasar Politik Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ismail Suny, **Pergeseran Kekuasaan Eksekutif**, Aksara Baru, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

-----; *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016.

-----; *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2017.

Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2017.

Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 2013.

Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

-----, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2019.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Konstitusi Indonesia*, PSH UII dan Gama Media, Yogyakarta, 2014.

Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghilia Indonesia, 2015.

R. M. Ananda B. Kusuma, *Sistem Pemerintahan Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016.

Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 2017.

-----; *Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung, 2016

Taufiqurrahman Syahuri, *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia Serta Perbandingannya dengan Negara Lain di Dunia*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Internet

Abdul Rochim, "Amandemen UUD 45 PBNU Usul Utusan Golongan Dihidupkan Kembali", <https://nasional.sindonews.com>, diakses 20 Juni 2022.

Bambang Soesatyo, "Wacara Menghidupan Utusan Golongan Perlu Dielaborasi", melalui <https://www.medcom.id/nasional/politik>, diakses 20 Juni 2022.

D. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel

AH. Mujib Rohmat, *Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.

Efi Yulistiyowati, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

R. Nazriyah, *Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Stuktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 1 2017.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, ***Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945***, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998.

Titik Triwulan Tutik, ***Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan***, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 1 Januari 2013.

Widayati, ***Rekonstruksi Kelembagaan MPR***, Prosiding Seminar Nasional, Jakarta, 2016.